

LECTURE NOTES

People
Innovation
Excellence

Character Building: Pancasila **Week ke - 2**

Pancasila dan Ideologi Dunia (Liberalisme dan Sosialisme)

LEARNING OUTCOMES

LO 1: to describe the Pancasila as the major basis for character education, the Pancasila as the state ideology and the world ideologies

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar liberalisme
2. Mahasiswa dapat memahami prinsip dasar sosialisme
3. Mahasiswa dapat membedakan liberalisme dan sosialisme dari Pancasila

ISI MATERI

A. Pendahuluan

Pancasila merupakan salah satu ideologi di antara ideologi-ideologi lainnya di dunia ini. Selain Pancasila, kita mengenal liberalisme dan sosialisme. Liberalisme merupakan ideologi yang dianuti oleh bangsa-bangsa Barat seperti Eropa dan Amerika Serikat dengan semua sekutu-sekutu mereka. Lalu sosialisme dianuti oleh bangsa-bangsa Timur. Dulu sosialisme bangsa-bangsa Timur ini dipimpin oleh Uni Sovyet. Namun, pasca Uni Sovyet pecah menjadi negara-negara yang demokratis seperti yang diparaktekan pada bangsa-bangsa Barat, Sosialisme itu, kini sangat banyak dipengaruhi oleh negara Cina.

Dalam uraian berikut ini, kita akan menemukan bahwa liberalisme berbasis pada kebebasan individu sebagai pusat kehidupan, lalu sosialisme berbasis pada kekuasaan negara. Sosialisme tidak mengakui individu atau sekurang-kurangnya kita dapat merumuskan sosialisme memberi peran yang sangat sedikit pada inisiatif dan partisipasi individu terutama dalam bidang politik. Sementara itu, pada pihak lain liberalisme berusaha sedemikian rupa untuk membatasi kekuasaan negara untuk mengatur kebebasan individu.

Pancasila sebagaimana akan kita bahas berikut ini, tidak menganut atau mendukung dan menegasikan salah satu dari ideologi tersebut. Pancasila di satu sisi memuat spirit liberalisme, dan pada sisi lain juga mengandung semangat sosialisme. Hal ini dapat kita temukan dari setiap sila Pancasila. Pancasila mengakui hak-hak sipil dan politik warga negara di satu sisi, lalu pada sisi lainnya, juga menerima peran negara untuk memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan sosial tidak diserahkan kepada pasar bebas sebagaimana yang diimpikan oleh liberalisme dalam semangat kapitalismenya, melainkan pada peran negara melalui berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang ada seperti beragam bantuan sosial untuk rakyat tidak mampu, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia sehat, dan berbagai kebijakan-kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan-kebijakan sosial ini tentu berbasis pada semangat sosialisme.

B. Liberalisme

Liberalisme merupakan sebuah pandangan yang menempatkan kebebasan individu sebagai yang paling utama dalam masyarakat, baik masyarakat politik maupun ekonomi. **Pertama, dalam bidang politik**, liberalisme di satu sisi mendukung peran negara yang seminimal mungkin, dan pada sisi lainnya memberi kebebasan yang sebesar-besarnya kepada

setiap warga negara secara individu. Setiap warga negara secara individual dianggap sebagai subjek yang otonom dapat mendefinisikan diri dan tujuan hidupnya sendiri.

Secara politik, negara dipandang sebagai “nightwatch state”. Negara dipandang sebagai penjaga malam. Negara dalam konteks ini membatasi diri semata-mata pada perlindungan dan pengamanan para warga negara. Negara menjaga setiap warga negara dari setiap tindakan yang merugikannya secara individu, termasuk dalam hal ini adalah harta milik individu (lihat K. Bertens, 2013, hal. 117).

Liberalisme politik, secara filosofis, dapat ditelusuri pada pandangan John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) tentang peran negara antas warga negara. Jhon Locke dikenal sebagai seorang filsuf politik Inggris berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran liberalisme politik. Menurut Locke negara didirikan terutama untuk melindungi hak milik pribadi. Negara dalam hal ini tidak didirikan untuk menciptakan kesamaan hak milik pribadi, melainkan semata-mata membatasi dirinya untuk melindungi hak milik pribadi. Negara tidak berurusan dengan perbedaan dalam hal hak milik pribadi. Hak milik pribadi tidak hanya berkaitan dengan barang-barang saja, tetapi juga berkaitan dengan hak hidup dan kebebasan pribadi (lihat Franz Magnis-Suseno, 2016, hal. 275).

Pandangan Locke tentang peran negara bersumber dari pandangannya tentang keadaan alamiah manusia (Samuel Freeman, 2013). Locke mengatakan “semua manusia secara alami . . . dalam keadaan kebebasan sempurna, untuk mengatur tindakan mereka sendiri”. Ia menengaskan bahwa "semua manusia pada dasarnya adalah sama"; mereka memiliki "hak yang sama atas kebebasan alami, tanpa tunduk pada kehendak atau otoritas manusia lain mana pun"

Locke juga mengatakan bahwa kesetaraan itu adalah "Hukum Alam". Locke percaya bahwa dalam hukum alamini semua manusia sama dan independen. Locke memahami karakter manusia dengan sangat positif dan optimis. Ia menjelaskan bahwa dalam keadaan alamian itu, setiap individu tidak saling menyakiti, sebab secara alamiah setiap manusia memiliki kewajiban yang sama untuk melestarikan diri mereka sendiri.

Kedua, liberalisme dalam bidang ekonomi

Liberalisme dalam bidang ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan pribadi, kepemilikan pribadi, dan campur tangan pemerintah yang terbatas. Liberalisme menegaskan bahwa kepentingan pribadi adalah komponen dasar dari sifat manusia. Di arena ekonomi, produsen memberi kita barang, bukan karena kepedulian terhadap kesejahteraan kita, tetapi karena keinginan mereka untuk mendapat untung. Demikian juga, pekerja menjual tenaga

mereka dan membeli barang-barang produsen sebagai sarana untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Ini mengarah pada keyakinan akan harmoni kepentingan yang alami. Dengan setiap individu mengejar kepentingan mereka sendiri, kepentingan terbaik masyarakat dilayani. Kekuatan ekonomi pasar persaingan bebas akan memandu produksi, pertukaran, dan distribusi dengan cara yang tidak dapat diperbaiki oleh pemerintah mana pun. Oleh karena itu, peran pemerintah terbatas pada perlindungan hak milik, penegakan kontrak penyediaan barang publik, dan menjaga keamanan internal dan eksternal. Liberalisme dalam konteks ini berkontribusi pada kapitalisme.

Pemikir atau filsuf kapitalisme yang sangat banyak dirujuk terkait dengan liberalisme dalam bidang ekonomi adalah Adam Smith (1723-1790). Smith dikenal sebagai pemikir yang gigih memperjuangkan dan membela pasar bebas dalam bidang ekonomi (K. Bertens, 2013, hal. 111). Smith menjelaskan bahwa sistem pasar bebas mengandaikan hak milik pribadi. Sejalan dengan Locke, Smith menggarisbawahi pentingnya milik pribadi. Namun, Smith berbeda dengan Locke tentang sifat hak milik pribadi tersebut. Bagi Locke, hak milik pribadi bersifat alamiah, sedangkan bagi Smith, hanya hak milik bersama yang bersifat alamiah, sedangkan hak milik pribadi bersifat artifisial (lihat, A. Sonny Keraf, 1996, hal. 149). Menurut Smith, kerja adalah satu cara alamiah untuk memperoleh hak milik pribadi.

Terkait dengan peran negara atas kegiatan ekonomi, Smith ((lihat, A. Sonny Keraf, 1996, hal. 172) berpendapat campur tangan atau kontrol pemerintah atas kegiatan ekonomi setiap orang harus ditolak. Campur tangan negara akan merugikan kegiatan ekonomi. Menurut Smith, setiap orang lebih tahu dari penguasa tentang apa yang paling baik bagi dirinya sendiri.

Kekuatan dan Kelemahan Liberalisme

K. Bertens (2013) dalam penjelasannya tentang kekuatan dan kelemahan liberalisme mendeskripsikan bahwa **kekuatan** utama dari liberalisme, terutama dalam bidang ekonomi adalah pengakuan yang sangat kuat terhadap milik pribadi. Pengakuan ini menurutnya merupakan cara penting untuk mewujudkan kebebasan pribadi. Sebab, kebebasan merupakan suatu nilai hakiki bagi manusia. Hak miliki dalam konteks ini merupakan perwujudan atau penghayatan terhadap kebebasan individu. Dengan memiliki properti pribadi, kita memiliki kebebasan untuk menjual, menyewakan atau menghadiahkan barang tersebut kepada siapa saja yang kita pilih. Seandainya tidak ada milik pribadi, ruang lingkup kebebasan kita pun menjadi sangat berkurang.

Namun, secara intrinsik, liberalisme, terutama liberalisme dalam ekonomi menyimpan kelemahan dalam prinsipnya sendiri. Kelemahan yang paling utama adalah liberalisme kurang

memperhatikan nasib kaum miskin dan orang yang kurang beruntung dalam hidup mereka. Bagi mereka, kemiskinan adalah produk dari kemalasan. Mereka percaya satu-satunya jalan mencapai kemakmuran individu adalah kerja keras. Liberalisme mengabaikan kenyataan bahwa ada begitu banyak orang yang sudah dengan segenap kemampuan bekerja keras, namun mereka tidak sampai mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.

C. Komunisme dan Sosialisme

Komunisme dan sosialisme secara prinsip itu sama. Keduanya sama-sama bercita-cita menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas. Liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu dan hak milik pribadi telah menciptakan kesenjangan sosial antara warga negara atau warga masyarakat. Sebab, tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam masyarakat. Mereka yang tidak mampu akan tertinggal, lalu sebaliknya mereka yang mampu akan terus maju. Kondisi seperti menciptakan kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Ada masyarakat yang mempunyai hak milik pribadi, namun sebagian yang lain tidak memiliki hak milik pribadi. Dengan demikian, mereka yang mempunyai hak milik pribadi cenderung lebih bebas, sebaliknya mereka yang tidak mempunyai hak milik pribadi cenderung tidak bebas. Artinya dalam masyarakat liberalisme itu, ada kelompok masyarakat yang bebas, dan ada kelompok masyarakat yang tidak bebas.

Oleh karena itu, komunisme dan sosialisme bercita-cita untuk menghapus kelas sosial dalam masyarakat. Masyarakat tanpa kelas akan menjamin kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Mekanismeyang tempuh adalah mengurangi kebebasan individu dan hak milik pribadi di satu pihak, dan memperbesar kekuasaan negara pada pihak yang lainnya. Dengan demikian, sosialisme dan komunisme menghapus atau membatasi hak milik pribadi dan menggantinya dengan pemilikan bersama atas sarana produksi.

Menurut paham ini, hak milik pribadi adalah hambatan utama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Dengan car aini, ketimpangan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakibatkan oleh liberalisme dapat diatasi. Dewasa ini, praktik komunisme dan sosialisme dapat kita temukan terutama pada negara Republik Rakyat Cina (RRC), Korea Utara dan Vietnam. Meskipun secara prinsip keduanya sama, namun dalam proses mencapai masyarakat tanpa kelas, keduanya menempuh jalan yang berbeda. Komunisme menempuh jalur revolusi, dan sosialisme mengambil jalan evolusi (lihat Ramelan Surbakti, 1999, hal. 37).

Ciri yang paling jelas dari negara komunis adalah monopoli partai negara (lihat, David Hel, et all, 1985 hal. 219). Biasanya negara-negara komunis cenderung menganut sistem single partai. Partai yang berkuasa adalah partai negara. Partai negara mengontrol seluruh aspek

kehidupan baik politik, sosial, pemerintahan, maupun ekonomi.

Dewasa ini, konsep sosialisme dan komunisme digunakan dalam konteks yang berbeda. Sosialisme terasosiasi dengan ekonomi, sedangkan komunisme terkait dengan politik. Negara-negara dengan ideologi politik komunis menganut sistem ekonomi sosialis. Tetapi negara-negara dengan sistem ekonomi sosial tidak harus menganut ideologi komunis. Negara-negara kesejahteraan (welfarestate) seperti di Eropa misalnya mengunut sistem sosialis dalam praktik ekonomi, namun secara politik mereka liberal.

Komunisme dan sosialisme diinspirasi dan berakar pada pemikiran sosial, ekonomi dan filosofi Karl Marx (1818-1883). Marx menganalisa gejala-gejala sosial dalam masyarakat dari perspektif sistem ekonomi. Ia menegaskan ekonomi adalah dasar dari masyarakat. Institusi sosial yang lainnya seperti keluarga, politik, agama, pendidikan dan sistem nilai, semua dibangun di atas prinsip ekonomi (lihat John J. Macionis, 1989, hal.102).

Dalam masyarakat kapitalis, ekonomi dikuasai oleh segelintir orang. Mereka adalah kaum borjuis. Sementara kelompok masyarakat yang lainnya adalah kaum proletar. Relasi antara kedua kelas ini bersifat antagonis. Pada satu pihak ada kelas bourjuis, dan pada pihak lainnya ada kelas proletar. Kelas borjuis menguasai faktor-faktor produksi, sementara kelas proletar hanya memiliki tenaga untuk bekerja. Bahkan, tenaga kaum proletar itu pun dikuasai oleh kelas borjuis. Kalau proletar dalam hal ini tidak hanya kehilangan control atas hasil pekerjaan mereka sendiri. Mereka juga tidak dapat mengontrol tenaga mereka sendiri. Dengan demikian mereka menjadi terasing (alienated).

Satu-satunya cara untuk mengatasi dikotomi kelas sosial tersebut adalah transformasi sosial dari masyarakat kapitalis menjadi masyarakat sosialis atau masyarakat tanpa kelas sosial. Dalam masyarakat tanpa kelas ini tidak ada kepemilikan pribadi. Kepemilikan hanya bersifat kolektif. Milik bersama.

Kekuatan dan Kelemahan Sosialisme

Sosialisme memuat kelematan dan juga kekuatannya (lihat, K. Bertens, 2013, hal. 214). Kekuatan utama sosialisme adalah pengakuan terhadap fungsi sosial dari hak milik. Hak milik itu tidak pernah dapat dibatasi oleh kepentingan pribadi saja. Sebagai contoh, saya membeli bendera merah putih dengan uang saya sendiri. Setelah membeli, maka bendera tersebut menjadi milik saya. Namun, meski demikian, bendera merah putih tersebut memuat dimensi sosialnya. Semua orang akan marah jika saya memperlakukannya dengan semena-mena.

Namun, sosialisme juga memiliki kelemahan yang mendasar. Kekuasaan negara yang

berlebihan atas warga negara telah menciptakan kehancuran. Kita semua mengetahui bahwa Unisoviet yang perkasa itu telah hancur, negara Jerman Timur juga telah bergabung dengan Jerman Barat, dan beberapa negara komunis lainnya juga telah mengalami kehancuran. Ini berarti, sistempolitik dan ekonomi yang mengabaikan hak-hak sipil dan politik warga negara cenderung tidak kokoh dan mudah hancur.

D. Pancasila

Kita sudah membahas secara singkat gambaran umum tentang liberalisme dan kapitalisme, lalu sosialisme dan komunisme. Pertanyaan kita adalah di mana posisi Pancasila, apakah Pancasila berada pada liberalisme dan kapitalisme, ataukah pada sosialisme dan komunisme?

Pancasila pada prinsipnya tidak menganut salah satu dari kedua paham tersebut di atas yakni liberalisme atau sosialisme. Pancasila berbasis pada lima nilai dasar yakni nilai Ketuhanan, Kamanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini secara konstitusional dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemansiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kalau kita memperhatian dengan saksama, pada kelima nilai dasar itu, termuat di dalamnya semangat liberalisme dan sosialisme sekaligus. Liberalisme seperti yang telah bahas secara umum di atas memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil warga negara. Hak-hak sipil ini berbasis pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia secara ontologis berbasis pada individu. Selain pengakuan terhadap hak sipil warga negara, liberalisme juga mengakui hak politik setiap warga negara.

Nilai-nilai Pancasila juga memuat pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Hak-hak sipil dan politik ini nampak jelas pada nilai ketuhanan, dan kamanusiaan dan bahkan berdasarkan prakteknya terdapat pada nilai permusyawaratan/perwakilan. Pancasila sangat menghormati hak-hak sipil, dan politik setiap warga negara. Pancasila mengakui, dan melindungi kebebasan setiap warga negara untuk berbicara, bereksresi, berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebebasan untuk berpartisipasi dalam bidang politik baik secara

kelompok maupun secara individu. Lebih khusus hak politik ini, pemilihan langsung baik untuk legislative maupun eksekutif adalah semangat liberalisme yang diakui dalam Pancasila. Tentu saja, kebebasan sipil yang berbasis pada hak-hak individu tersebut berdampak pula pada pengakuan terhadap hak milik pribadi.

Lalu, spirit sosialisme juga dapat kita temukan dalam Pancasila. Sekurang-kurangnya kita temukan itu dalam sila ketiga dan kelima Pancasila. Pada sila kelima yakni keadilan sosial, jelas-jelas memuat prinsip sosialisme. Keadilan sosial selalu bergantung pada struktur sosial yang adil. Negara adalah bagian terbesar, teratas dari struktur sosial itu. Pada pembahasan tentang sosialisme, kita sudah menemukan bahwa sosialisme berpusat pada peran negara yang sangat besar. Terkait dengan sila kelima tersebut, negara memiliki peran yang sangat besar untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa agar setiap warga negara, setiap kelompok dapat mencapai kesejahteraan sosial. Negara dalam hal ini memiliki otoritas menciptakan regulasi sedemikian rupa agar kesejahteraan ekonomi tidak hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang saja, melainkan oleh semua warga negara. Dengan peran negara yang signifikan itu, kebaikan bersama dapat dicapai. Kebaikan bersama ini tentu saja merupakan prinsip dasar dari nilai Persatuan Indonesia. Kita tidak hanya bersatu dalam semangat nasionalisme, tetapi juga bersatu dalam pengertian sama-sama menikmati kesejahteraan sosial.

Pancasila tidak menganut liberalisme dengan menentang sosialisme seperti yang dipraktekan pada bangsa-bangsa Barat, atau menganut sosialisme sambil mengesampingkan liberalisme seperti yang praktikan pada bangsa-bangsa Timur. Pancasila tidak berpihak pada ideologi manapun.

E. Penutup

Prinsip imparsial Pancasila dapat kita telusuri pada tokoh penggali dan penemu Pancasila itu sendiri Soekarno. Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai*, pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang itu, Soekarno mengemukakan lima dasar negara Indonesia yakni; Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat-atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan. Kelima dasar yang kemukakan oleh Soekarno tersebut di rumuskan kembali menjadi;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan)
2. Kemansiaan yang adil dan beradab (Internasionalisme atau Perikemanusiaan)
3. Persatuan Indonesia (Kebangsaan)

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan(Mufakat-atau demokrasi)
5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan Sosial).

Pada penjelasan Soekarno sendiri mengenai dasar “Internasionalisme atau Perikemanusiaan”. Prinsip internasionalisme berhubungan dengan relasi bangsa Indonesia dengan berbagai ideologi lainnya di dunia ini.

Terdapat tiga makna yang dapat kita refleksikan dari prinsip internasionalisme atau prikemanusaan yang kemukakan oleh Soekarno. **Pertama**, Indonesia yang dibangun bukan sebuah bangsa yang tertutup. Memakai kata Soerkano sendiri, Indonesia bukan bangsa yang “isolationistis”. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang terbuka untuk bekerja sama secara setara dengan bangsa manapun di dunia ini. Indonesia dapat berhubungan dengan prinsip kapitalisme dan Indonesia juga dapat membangun relasi dengan sosialisme. Indonesia dapat membangun kerja sama dengan bangsa-bangsa Barat dan Indonesia juga dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa Timur.

Namun, meskipun terbuka untuk bergaul dengan liberalisme dan sosialisme, Indonesia tidak menganut prinsip liberalisme dan kapitalisme Barat yang cenderung eksplotatif, dan juga bukan sosialisme yang tidak menghargai individu sebagaimana yang dihayati pada bangsa-bangsa Timur.

Indonesia adalah sebuah bangsa yang berdaulat dan bebas menentukan nasibnya sendiri. Komunisme tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi Pancasila menjunjung tinggi keberadaan Tuhan, Kapitalisme cenderung eksplotatif dan individualistik, sementara Pancasila menyadari pentingnya prinsip Perikemanusiaan dan kesejahteraan bersama.

Kedua, Internasionalisme di satu sisi harus berbasis pada prinsip kebangsaan Indonesia (Persatuan Indonesia), dan pada sisi lain demi kebangsaan Indonesia. Soekarno mengatakan, Internasionalisme harus berakar dari dalam bumi kebangsaan Indonesia. Mengutip Soekarno, “Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme”.

Dalam kaitan dengan penjelasan Soekarno tentang prinsip “kebangsaan”, nasionalisme dapat berartisemangat untuk hidup bersama, mau hidup bersama. Dengan demikian, kalau dikatakan, harus berakar dari bumi nasionalisme Indonesia, maka internasionalisme itu harus mencerminkan semangat kebangsaan Indonesia. Sekali lagi, semangat kebangsaan Indonesia berbasis pada semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa.

Sampai disini, jelaslah bahwa internasionalisme itu merupakan jalan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan semangat kekeluargaan bangsa-bangsa. “Keluar”, Indonesia tidak akan pernah membangun semangat kekeluargaan bangsa-bangsa, kalau “ke dalam”-nya sendiri, Indonesia tidak memiliki semangat hidup bersama, tidak memiliki semangat kekeluargaan, tidak memiliki semangat gotong royong. Kekeluargaan bangsa-bangsa merupakan refleksi atau cerminan dari semangat kebangsaan Indonesia “ke dalam”.

Secara internasional, bangsa-bangsa di dunia ini sangat beragam baik dari sisi identitas sosial, maupun dari sisi sumber daya alam, dan ideologi. Agama, suku bangsa, ras, bahasa sangat berbeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Demikian juga dengan sumber daya alamnya. Ada bangsa yang kaya akan sumber daya alam, namun ada yang sangat miskin. Ideologipun demikian. Adabangsa yang menyakini liberalisme, ada juga bangsa yang meyakini komunalisme (komunisme).

Hal yang sama juga dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indonesia dibangun dari semangat untuk hidup bersama dari begitu banyak kelompok sosial yang berbeda. Dari sisi agama ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan tidak terhitung aliran kepercayaan. Lalu dari sisi suku bangsa jumlahnya sangat banyak, dan hampir semua ras di dunia inipun hidup di Indonesia. Kemudiandari sisi wilayah, Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau. Indonesia dalam konteks ini dapat dilihat sebagai internasionalisme mini itu sendiri.

Internasionalisme, tidak hanya harus tumbuh dari kebangsaan Indonesia, tetapi juga ditujukan demi kebangsaan Indonesia itu sendiri. Ini berarti, semangat internasionalisme merupakan jalan melalui mana kita bangsa Indonesia terus memperkuat dan terus mereproduksi semangat kebangsaan Indonesia, atau semangat persatuan.

Pergaulan Internasional dengan demikian harus memperkaya semangat toleransi dan kesetaraan sebagai dasar etik bagi semangat untuk hidup bersama sebagai satu bangsa, dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi semua sebagai tujuan dari ada bersama itu.

Secara ilustratif kita menggambarkan, kita dapat bergaul dengan bangsa-bangsa Arab bukan supaya kita menjadi seperti Arab, atau bergaul dengan bangsa-bangsa Eropa bukan supaya kita menjadi seperti bangsa Eropa, atau bergaul dengan Tiongkok bukan supaya kita menjadi seperti Tiongkok dan lain sebagainya.

Kita bergaul dengan semua bangsa itu, dengan tujuan memperkokoh kebangsaan Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia dapat belajar dari Arab, Eropa, Tingkok dan sebagainya untuk memperkaya semangat kebangsaan kita, memperkokoh semangat persatuan kita sebagai satu bangsa.

Ketika bangsa Indonesia tidak berafiliasi dengan salah satu prinsip dan blok internasional tersebut, Bangsa Indonesia dapat memainkan peran yang lebih bebas untuk menjadi jembatan melalui mana bangsa-bangsa yang berada pada prinsip dan blok yang berbeda dapat saling berhubungan, ataumembangun relasi satu dengan yang lainnya.

Selain fungsi instrumental tersebut, dengan menjadi bangsa yang terbuka dan tidak berafiliasi dengan salah satu prinsip dan blok itu, secara substantif, bangsa Indonesia yang dibangun diatas keberagaman, tidak terjebak pada salah satu prinsip atau blok yang justru dapat merusak prinsip kebangsaan Indonesia. Dengan demikian, menjadi bangsa yang terbuka, bergaul bebas secara internasional justru harus memperkuat semangat kebangsaan Indonesia.

Ketiga, internasionalisme harus dibangun di atas semangat “Perikemanusiaan”. Prinsip ini sangat penting dalam membangun relasi dengan bangsa-bangsa lain. Internasionalisme tidak dimaksudkan untuk mengeksplorasi bangsa-bangsa lainnya. Internasionalisme merupakan mekanisme melalui mana setiap bangsa dapat mencapai tujuan-tujuan nasionalnya sendiri.

Perikemanusiaan merupakan prinsip moral dari relasi internasional itu. Tanpa prinsip ini, relasi internasional akan jatuh dalam semangat untuk saling mengeksplorasi, saling menguasai, dan saling menegaskan. Tanpa prinsip perikemanusiaan, setiap bangsa akan berjuang untuk mencari untungnya sendiri. Tetapi dengan prinsip perikemanusiaan, setiap bangsa akan berusaha untuk saling berkontribusi bagi kemajuan bangsa lainnya.

Mengeksplorasi bangsa-bangsa lain bukan hanya dapat menyebabkan konflik antara bangsa,tetapi juga dapat membuat tujuan-tujuan nasional sebuah bangsa tidak dapat dicapai dengan mudah atau bahkan tidak dapat tercapai sama sekali. Dengan demikian, semangat perikemanusiaan memungkinkan bangsa-bangsa dapat bersatu, bekerja sama, saling bergotong royong untuk mencapai tujuan nasionalnya masing-masing untuk dunia yang labih baik, saling peduli, dan menghormati.

Pertanyaan diskusi

1. Deskripsikan secara jelas tentang liberalisme dan contohnya dalam politik dan ekonomi
2. Deskripsikan secara jelas tentang sosialisme dan contohnya dalam politik dan ekonomi
3. Deskripsikan perbedaan Pancasila dengan liberalisme dan sosialisme

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf (1996), Pasa Bebas Keadilan & Peran Pemerintah, Telaah Atas Eika Politik Ekonomi Adam Smith, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- David Held, et all (1985), State & Society, Oxford, UK: Basil Blackwell
- Franz Magnis-Suseno, (2016), Etika Politik, Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- John J. Macionis (1989), Sociology, 2nd edition, New Jersey: Prentice Hall
- K. Bertens, (2013), Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius
- Samuel Freeman, (2013), Liberalism, https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/e/483/files/2018/07/liberalism_oup_encyclopedia_of_politics-1o2lwvr.pdf
- Ramlan Surbakti (1999), Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Pancasila Bung Karno, Diterbitkan oleh Badiklat Pusat PDI Perjuangan, Agustus 2019
- Tim CBDC. (2018). Character Building Pancasila (CHAR6013). Jakarta. ISBN: 0. Chapter 2

Supporting material:

- SM02a - Liberalism,
https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/web.sas.upenn.edu/dist/e/483/files/2018/07/liberalism_oup_encyclopedia_of_politics-1o2lwvr.pdf
- SM02b - PANCASILA DI ERA PASKA IDEOLOGI
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3233>